

TABLOID

UMAH RAKYAT

• DPRD KOTA MAKASSAR

80

Kemerdekaan dengan Kerja Keras dan Inovasi



EDISI AGUSTUS 2025

FREE

Pengantar

Pembina/Penasehat

Ketua DPRD Kota Makassar

Supratman

Wakil Ketua I

Andi Suharmika, S.H

Wakil Ketua II

Anwar Faruq, S.Kom

Wakil Ketua III

Eric Horas, SE., MM

Ketua Komisi A

Andi Pahlevi, SE, MM

Ketua Komisi B

Ismail, S.H

Ketua Komisi C

Azwar Rasmin

Ketua Komisi D

Ari Ashari Ilham, S.E

Pengarah: Plt. Sekretaris DPRD
Kota Makassar

ANDI RAHMAT M.

Penanggung Jawab

PPID Pembantu Sekretariat DPRD

Kota Makassar

Kabag Persidangan

**Dr. Hj. Widiawati Said, S.Sos.,
S.Pd**

Kabag Humas dan Protokol

Syaril, S.STP

Kabag Keuangan

Abdul Kadir, SE, MM

Kabag Umum

Dr. Muhajir, S.KM., M.Kes

ALAMAT KANTOR

DPDR Kota Makassar

Jl. Andi Pangeran Pettarani, Blok E
NO. 1-2 Tidung, Kec Rappocini, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan

Salam Sejahtera

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Majalah DPRD Kota Makassar edisi Agustus 2025 dapat kembali hadir di hadapan para pembaca setia. Edisi kali ini terasa sangat istimewa karena bangsa Indonesia tengah memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema besar "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".

DPRD Kota Makassar turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan penting di bulan kemerdekaan ini. Berbagai agenda kelembagaan, mulai dari Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat, peninjauan lapangan, hingga kunjungan konstruktif, menjadi wujud nyata komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran.

Tidak hanya itu, pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar juga berkesempatan menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-80 RI di Lapangan Karebosi, di mana Ketua DPRD Kota Makassar mendapatkan kehormatan untuk membacakan Teks Proklamasi di hadapan seluruh peserta upacara. Melalui edisi ini, kami berharap semangat kemerdekaan dapat senantiasa menyertai setiap langkah perjuangan kita.

Hormat kami

Daftar Isi

BERANDA PARLEMEN 04-11

- Sekretariat DPRD Makassar Dorong Transparansi Publik Lewat Sosialisasi Portal Digital
- Demo di DPRD Makassar, Warga Biringkanaya dan Tamalanrea Tolak Pembangunan PLTSa
- PLTSa, Banjir, dan Infrastruktur Dominasi Laporan Reses DPRD Makassar
- Rapat Paripurna, DPRD Makassar Bahas Ranperda Perhubungan dan Parkir
- Ketua DPRD Makassar Hadiri Apel Besar Hari Pramuka ke-64
- Supratman Ajak Warga Makassar Isi Kemerdekaan dengan Kerja Keras dan Inovasi
- HUT RI ke-80, Sekretariat DPRD Makassar Gelar Acara Seremonial dan Aneka Perlombaan
- Sekretariat DPRD Makassar Alami Perubahan Positif

KOMISI 12-17

- Komisi A dan Komisi B Akan Panggil Toko Modern Bahas Isu Krusial
- Komisi B Tinjau Fasilitas dan Kelayakan Pasar Terong Sebelum Relokasi
- Komisi C Usul Pembangunan PLTSa Dipindahkan ke TPA Antang
- Komisi B Sidak Toko Modern, Pastikan Penuhi Aturan
- Komisi D Rapat Konsultasi Bersama Dinas Kebudayaan
- Komisi A Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

SOSIALISASI PERDA 18-23

- Muchlis Misbah Minta Perda Pengelolaan Zakat Diperbarui dan Diperkuat Perwali
- Andi Tenri Uji Idris Sosialisasikan Perda Perumda Air Minum Kota Makassar
- Ruslan Lallo Ingatkan Pajak Bukan Sekadar Kewajiban

- Andi Suhada Sappaile Minta Orang Tua Dampingi Anak Bermain Gadget
- Odhika Cakra Ajak Warga Kawal Kebijakan Daerah
- Meinsani Kecca Dorong Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

ASPIRASI 24-29

- Umiyati Tegaskan Penerapan QRIS Disertai Penguatan Infrastruktur
- Ray Suryadi Tegaskan Kabel FO Semrawut Ancam Keselamatan dan Estetika
- Kasrudi Harap Koperasi Merah Putih Membuka Peluang Usaha Baru
- Andi Makmur Dukung Usulan Festival Budaya Satu Bulan di Makassar
- Andi Suharmika Desak Perbaikan Sistem Pengelolaan Sampah
- Nasir Rurung: Pembangunan PLTSa di TPA Antang Sudah Sesuai Aturan

METRO 30-31

- Munafri Maknai Hari Kemerdekaan Jika Masyarakat Bebas dari Masalah Sosial
- Kado HUT RI ke-80, Pemkot Makassar Pastikan PBB 2025 Tidak Naik

NASIONAL 32-34

- Prabowo Perdana Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-80 RI
- Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Hadirkan Harapan untuk Anak Indonesia

LIFESTYLE 35-37

- Jejak Kucing di Dunia Sains: Hewan Lucu yang Berjasa bagi Ilmu Pengetahuan
- 5 Film India Ini Bikin Kamu Mikir Keras, Ending-nya Bikin Shock!

PROFIL 38-39

- Profil Hartono, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar

Sekretariat DPRD Makassar

Dorong Transparansi Publik Lewat Sosialisasi Portal Digital

Sekretariat DPRD Kota Makassar kembali mengambil langkah strategis dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui sosialisasi internal pemanfaatan portal DPRD yang digelar pada Jumat (1/8/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap seluruh agenda resmi DPRD Kota Makassar secara digital dan real-time.

Dengan pemanfaatan portal ini, seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD kini ditugaskan untuk mengunggah dan memperbarui agenda yang bersifat publik, sehingga masyarakat luas, khususnya pengguna ponsel berbasis Android, dapat menerima notifikasi langsung setiap kali terdapat agenda baru.

“Kita ingin semua agenda DPRD yang bersifat publik bisa diakses oleh siapa saja. Inilah bentuk komitmen kami untuk membangun transparansi dan partisipasi masyarakat melalui pendekatan teknologi,” ujar Sekretaris DPRD Kota Makassar, A.Rahmat.



Portal digital ini dilengkapi fitur notifikasi yang memungkinkan masyarakat menerima pemberitahuan otomatis terkait agenda DPRD yang telah diperbarui oleh masing-masing PIC (person in charge) di setiap bagian. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju layanan informasi parlemen yang modern, inklusif, dan responsif.

“Ini memang masih tahap awal, tentu akan ada evaluasi dan penyempurnaan ke depan. Tapi dengan dukungan dari seluruh jajaran Sekretariat DPRD, kami optimis inovasi digital ini akan terus berkembang dan menjadikan DPRD Kota Makassar lebih dekat dengan masyarakat, cukup dalam satu genggam,” tambahnya.

Demo di DPRD Makassar, Warga Biringkanaya dan Tamalanrea Tolak Pembangunan PLTSa

Ratusan warga dari berbagai kelurahan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, yakni Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia, yang tergabung dalam Aliansi GERAM PLTSa (Gerakan Rakyat Menolak Lokasi PLTSa), menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (6/8/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) oleh PT Sarana Utama Energy (PT. SUS) yang dinilai merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.

Dalam pernyataan aksi aliansi tersebut, mereka menilai Pembangunan PLTSa yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diperkuat oleh Perpres No. 35 Tahun 2018, cacat dari segi prosedur dan substansi.

Teknologi insinerator yang digunakan dalam-

PLTSa dianggap tidak ramah lingkungan dan berisiko tinggi menimbulkan polusi udara, pencemaran air, serta menurunkan kualitas hidup warga sekitar, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

“Dalam praktiknya, PLTSa memiliki risiko tinggi merusak kesehatan publik dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan PLTSa melakukan proses pembakaran yang akan menghasilkan gas dan partikulat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya,” ujar Hj Asiz warga Mula Baru sekaligus Korlap.

Tidak hanya berdampak ekologis dan kesehatan, PLTSa juga dinilai akan membebani keuangan daerah dalam jangka panjang karena skema tipping fee yang harus dibayarkan Pemkot kepada operator. Skema ini berpotensi menyerap anggaran publik hingga puluhan tahun ke depan dan menghambat program prioritas lain.





PLTSa, Banjir, dan Infrastruktur Dominasi Laporan Reses DPRD Makassar

DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna pada Jumat (15/8/2025) di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani. Agenda utama rapat adalah penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025.

Juru bicara Dapil Makassar I, Fahrizal Ar-Rahman Husain, menyampaikan aspirasi warga terkait perbaikan infrastruktur jalan, penanganan banjir, peningkatan fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia menekankan urgensi pemerintah kota untuk segera menindaklanjuti usulan tersebut.

“Kami juga menemukan masih banyak program pemerintah yang belum terealisasi. Pemkot harus memberikan perhatian khusus agar program yang tertunda segera dijalankan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dari Dapil II, Ismail menyoroti pentingnya kerja sama antara Pemkot Makassar dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas lapangan kerja serta mendorong langkah progresif demi kesejahteraan warga.

pemangku kepentingan dalam memperluas lapangan kerja serta mendorong langkah progresif demi kesejahteraan warga.

Sementara itu, juru bicara Dapil Makassar III, Idris, mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di kawasan padat penduduk.

Ia juga menekankan perlunya penambahan armada pengangkut sampah, perbaikan lampu jalan, penutupan lubang jalan, kemudahan akses Kartu Indonesia Sehat, pemerataan bantuan sosial, pemasangan CCTV, serta koordinasi lintas instansi untuk mengatasi banjir di wilayah terdampak.

Dari Dapil IV, Hartono menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta perbaikan jalan, drainase, pengendalian banjir, pelatihan pengurus koperasi, hingga perbaikan sistem penerimaan siswa baru.

Rapat Paripurna, DPRD Makassar Bahas Ranperda Perhubungan dan Parkir



DPRD Kota Makassar membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait parkir dan perhubungan dalam rapat paripurna, Jumat (15/8/2025), di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.

Regulasi baru tersebut dinilai mendesak untuk mengatasi persoalan kemacetan, keterbatasan lahan parkir, serta tata kelola transportasi di kota metropolitan yang terus berkembang ini. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut aturan lama, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang parkir, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang parkir, sehingga memicu kemacetan dan parkir liar.

DPRD Kota Makassar membahas dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait parkir dan perhubungan dalam rapat paripurna, Jumat (15/8/2025), di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani.

Regulasi baru tersebut dinilai mendesak untuk mengatasi persoalan kemacetan, keterbatasan lahan parkir, serta tata kelola transportasi di kota metropolitan yang terus berkembang ini. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut aturan lama, yakni Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang parkir, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang parkir, sehingga memicu kemacetan dan parkir liar.



"Ranperda ini bertujuan menciptakan ketertiban lalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan publik"

Ketua DPRD Makassar Hadiri Apel Besar Hari Pramuka ke-64

Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus Sekretaris Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Makassar, Supratman, menghadiri Apel Besar Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025, yang digelar Kwarcab Kota Makassar, Sabtu (16/8/2025).

Apel besar yang berlangsung di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari ini diikuti oleh jajaran pejabat daerah, anggota pramuka, serta berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Supratman turut mendampingi Ketua Kwarcab Kota Makassar yang juga Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi. Hadir pula Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham.

Pada momentum tersebut, Ketua Kwarcab Makassar, Fatmawati Rusdi, menyerahkan secara simbolis Kartu Tanda Anggota (KTA) Pramuka kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar sebagai bentuk penghargaan atas dukungan serta partisipasi aktif keduanya dalam pembinaan kegiatan kepramukaan di Kota Makassar.

Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat semangat kepramukaan sekaligus meneguhkan komitmen bersama dalam membentuk generasi muda yang berakarakter, disiplin, dan peduli terhadap masyarakat.



Supratman Ajak Warga Makassar Isi Kemerdekaan dengan Kerja Keras dan Inovasi

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Karebosi, Minggu (17/8/2025).

Dalam suasana penuh khidmat dan semangat kebersamaan, Supratman juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat Makassar untuk merefleksikan makna kemerdekaan dan memperkuat persatuan dalam membangun bangsa.

"Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80! Kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, inovasi, dan dedikasi untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," ujar Supratman.

"Makassar sebagai Kota Metropolitan harus terus berbenah, dan menjadi motor penggerak ekonomi di Indonesia timur. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini," tegasnya. Selain itu, Supratman mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan toleransi. Ia berharap semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia tetap hidup dan menjadi landasan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

"Semoga di usia ke-80 ini, Indonesia semakin maju, makmur, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama membangun bangsa yang kita cintai ini menjadi lebih baik lagi," tutup Supratman.

"momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi pengingat penting bagi generasi penerus untuk terus melanjutkan pembangunan, khususnya di Kota Makassar"



HUT RI ke-80, Sekretariat DPRD Makassar Gelar Acara Seremonial dan Aneka Perlombaan

Untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke-80, Sekretariat DPRD Kota Makassar menggelar seremonial dan berbagai lomba, di halaman Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Sabtu (16/08/2025).

Kegiatan diawali dengan pawai di jalan raya diikuti oleh pimpinan, staf, dan anggota keluarga besar Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Usai pawai, suasana berubah meriah dengan berbagai lomba khas 17 Agustus yang melibatkan pegawai serta keluarga. Lalu selanjutnya, acara kemudian di tutup dengan makan bersama dan hiburan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mapatobba -

menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya untuk memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga bagaimana kita mensyukuri atas nikmat hasil perjuangan para pejuang kita dalam merebut kemerdekaan.

“Semangat kemerdekaan harus kita wujudkan dengan meningkatkan persatuan dan kerja sama, baik dalam tugas maupun kebersamaan sehari-hari,” ujarnya.

Tak hanya itu, Pak Sekwan juga meminta agar para pegawai dan keluarga besar DPRD Makassar senantiasa menjaga semangat dalam mengisi kemerdekaan di kehidupan sehari-hari.

“Jadi mariki senantiasa menjaga semangat kita dan mengisi kemerdekaan dengan hal yang positif demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dimasa yang akan datang,” pungkasnya.

Sekretariat DPRD Makassar Alami

Perubahan Positif

Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah memberikan apresiasi kepada Plt Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba atas berbagai perubahan positif yang telah dilakukan di lingkungan sekretariat.

Menurutnya, langkah awal berupa penataan area parkir dan pengaspalan halaman kantor menjadi pintu masuk bagi perbaikan yang lebih luas. "Perhatian terhadap hal-hal kecil ternyata berdampak besar pada suasana kerja," ujar Muchlis Misbah dalam keterangannya kepada media, Minggu (23/8/2025).

Tidak hanya menyentuh aspek fisik, kata Anggota Komisi D DPRD Makassar ini, Andi Rahmat telah menekankan pembinaan kedisiplinan pegawai di DPRD Makassar. Dengan gaya kepemimpinan tegas namun memberi teladan, ia dinilai berhasil menumbuhkan kembali semangat kerja yang lebih tertib.

"Bukan cuma saya yah, banyak dewan lain juga yang mengapresiasi langkah Pak Sekwan saat ini dengan melihat perubahan kedisiplinan yang signifikan. Para pegawai kini lebih rapi dan teratur dalam melaksanakan tugas," kata Muchlis.

Salah satu inovasi yang mendapat sorotan adalah kebiasaan seluruh pegawai untuk berdiri tegak saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan setiap pagi dan sore. Rutinitas ini dianggap bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata penguatan nilai kebangsaan.

Selain menumbuhkan nasionalisme, suasana religius bagi umat muslim juga semakin terasa dengan kebijakan kumandang adzan yang tersambung ke seluruh ruangan sebagai pengingat waktu salat.

"Itulah contoh yang sangat bagus dihadirkan Pak Sekwan, jadi kita sangat terbantu dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah," ungkap Muchlis Misbah yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Makassar.



Komisi A dan Komisi B Akan Panggil Toko Modern Bahas Isu Krusial

S Komisi A Bidang Pemerintahan dan Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak SAPMA Pemuda Pancasila Kota Makassar dan perwakilan manajemen Alfamidi, Jumat (1/8/2025) di Ruang Banggar DPRD Makassar.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Ismail, didampingi Tri Sulkarnaain Ahmad dan Andi Makmur Burhanuddin (Komisi A) membahas sejumlah isu krusial, mulai dari dugaan pencemaran nama baik hingga persoalan izin usaha dan pajak Alfamidi di Kota Makassar.

Pemanggilan tersebut dipicu insiden yang terjadi pada Sabtu malam, 19 Juli 2025, ketika seorang warga bernama Putra dan rekannya, Cici, dituduh mencuri di salah satu gerai Alfamidi. Setelah pemeriksaan rekaman CCTV, tuduhan tersebut terbukti tidak benar.

“Alhamdulillah pihak Alfamidi dan Sapma PP sudah saling memaafkan. Namun, kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi tuduhan yang terburu-buru terhadap pelanggan,” ujar Ismail saat ditemui usai rapat.

Namun lebih dari itu, Ismail menekankan bahwa kejadian ini membuka ruang untuk menggali persoalan lebih besar terkait keberadaan toko-toko modern di Makassar, terutama soal perizinan dan dampaknya terhadap pelaku UMKM lokal.

“Setelah ini, Komisi B bersama Komisi A akan memanggil semua toko modern yang beroperasi di Makassar, lengkap dengan para pimpinannya. Kita ingin tahu bagaimana izin-izin mereka, dan apakah keberadaan mereka selama ini sudah mempertimbangkan dampak terhadap pertumbuhan UMKM,” tegasnya.



Komisi B Tinjau Fasilitas dan Kelayakan Pasar Terong Sebelum Relokasi



Rencana relokasi pedagang Jalan Sawi, Pasar Terong, mulai bergerak ke tahap implementasi. Komisi B DPRD Kota Makassar turun langsung ke lapangan pada Senin (4/8/2025) untuk meninjau kesiapan fasilitas yang akan digunakan pedagang.

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, bersama sejumlah anggota dewan dan jajaran Direksi Perumda Pasar Makassar Raya.

Peninjauan ini menjadi tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya membahas penertiban kawasan pasar sekaligus pengembalian fungsi fasilitas umum.

"kami meninjau langsung gedung relokasi pedagang Jalan Sawi di Pasar Terong. Kunjungan ini untuk memastikan tempat yang disiapkan sudah layak dan aman digunakan," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, para legislator turut berdialog dengan pengelola pasar untuk memastikan kesiapan sarana, kelayakan bangunan, hingga aspek keselamatan pedagang yang akan direlokasi.

Ismail menegaskan relokasi harus berjalan tertib dan tidak menimbulkan kerugian di pihak manapun. "Kami berharap relokasi ini menjadi solusi yang adil, dengan tetap mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kelangsungan usaha para pedagang di lokasi baru," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Ali Gauli Rasyid, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema untuk memastikan relokasi berjalan lancar.

Komisi C Usul Pembangunan PLTSa Dipindahkan ke TPA Antang

Ratusan warga dari sejumlah kelurahan di Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, yakni Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di wilayah mereka.

Penolakan ini disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Kota Makassar, Rabu (6/8/2025).

Rapat tersebut menghasilkan kesimpulan, antara anggota Komisi C dan warga sepakat menolak Pembangunan PLTSa di wilayah Mula Baru, Tamalalang, Alamanda, dan Akasia. Mereka menginginkan pembangunannya di wilayah TPA Antang, Tamangapa, Manggala.

Sebab, sampah yang akan dikelola sudah tak jauh dari pabrik, sehingga mengurangi biaya operasional. Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi warga dan-

mempertanyakan kejelasan perencanaan tata ruang pembangunan PLTSa tersebut.

Menurutnya, Warga merasa terancam oleh proyek ini, baik dari segi kesehatan anak-anak dan cucu mereka di masa depan, maupun potensi pencemaran udara, air, serta kemacetan akibat lalu lintas truk sampah.

“Oleh karena itu sangat rasional ketika mereka warga datang untuk menolak karena memang kami juga mempertanyakan wilayah itu masuk perencanaan apa? Detail tata ruangnya itu seperti apa karena disana kan ada perumahan, ada industri,” ujarnya.

Komisi C dan warga pun sepakat agar pembangunan PLTSa dialihkan ke lokasi yang lebih layak, yakni di wilayah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang. Selain dekat dengan sumber sampah, hal itu dinilai lebih efisien dan tidak mengorbankan ruang hidup warga.





Komisi B Sidak Toko Modern, Pastikan Penuhi Aturan



Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko modern pada Jumat (8/8/2025), sebagai tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar.

Sidak ini melibatkan semua Komisi DPRD Kota Makassar, yakni Komisi A, B, C dan D, serta OPD terkait Pemerintah Kota Makassar. Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Ismail, menyasar beberapa gerai ritel di Kota Makassar, di antaranya Indomaret, Alfamidi, Alfamart, M-Mart, dan Circle K.

Menurut Ismail, sidak ini bertujuan untuk meninjau langsung kepatuhan toko modern terhadap aspek legalitas usaha yang berlaku.

“Dalam giat hari ini, saya bersama sejumlah-

anggota DPRD Kota Makassar serta SKPD terkait melakukan peninjauan langsung ke beberapa toko modern yang diduga belum sepenuhnya memenuhi aspek legalitas usaha,” ujar Ismail.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perizinan dan kepatuhan operasional sektor ritel modern, yang dinilai masih lemah.

Tak hanya persoalan legalitas, Komisi B DPRD Makassar juga menyoroti minimnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai pasok toko modern.

“Kami meyakini bahwa kolaborasi antara pelaku usaha besar dan UMKM perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan,” tegas Ismail.

Komisi D Rapat Konsultasi Bersama Dinas Kebudayaan



Komisi D DPRD Kota Makassar melakukan rapat konsultasi dalam rangka membahas sinkronisasi program kerja mitra kerja Komisi D bidang kesejahteraan rakyat, Rabu (20/8/2025).

Salah satu OPD yang menjadi mitra kerja komisi D yang mengikuti rapat konsultasi adalah Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Kepala Dinas Kebudayaan Makassar Andi Patiware hadir langsung didampingi sejumlah staf dinas kebudayaan.

Agenda rapat ini membahas sinkronisasi program kerja bersama mitra Komisi D, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kebudayaan.

Kehadiran Kadisbud menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan program kebudayaan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Rapat berlangsung di Ruang Komisi D DPRD Kota Makassar dengan melibatkan berbagai mitra kerja terkait. Jalannya rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham, dan dihadiri sejumlah anggota komisi D



Komisi A Dorong Perbaikan Armada Sampah dan Fasilitas Kelurahan

Persoalan kebersihan dan fasilitas pelayanan publik kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Makassar bersama seluruh camat se-Kota Makassar, Rabu (20/8/2025).

Dua isu utama yang mendapat sorotan adalah armada pengangkut sampah yang belum optimal serta kantor lurah yang masih menempati bangunan sementara. Kondisi ini dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas layanan masyarakat.

Mereka pun mengusulkan agar pengelolaan armada dikembalikan ke kecamatan agar lebih cepat ditangani. Selain itu, masih ada beberapa kelurahan di Makassar yang belum memiliki gedung permanen.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menegaskan semua aspirasi camat akan-

menjadi bahan pembahasan serius di tingkat Badan Anggaran.

"Masukan yang disampaikan cukup krusial, mulai dari armada sampah, kantor lurah, hingga kekurangan tenaga kebersihan. Kami akan berkoordinasi dengan Banggar agar aspirasi ini tidak diabaikan," kata Andi Makmur.

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran di beberapa kecamatan pada perubahan APBD tahun ini. Meski begitu, ia berharap para camat tetap berupaya menjaga kualitas layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Selain armada dan kantor, tenaga kebersihan juga menjadi masalah lain. Beberapa kecamatan melaporkan berkurangnya jumlah personel kebersihan. "Kami akan mengkoordinasikan masalah ini dengan BKD dan Ortala untuk mencari solusi penambahan tenaga kebersihan," tambahnya.



Muchlis Misbah Minta Perda Pengelolaan Zakat Diperbarui dan Diperkuat Perwali

Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat diperbarui dan diperkuat dengan peraturan wali kota (Perwali).

Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi Perda di Hotel Grand Imawan, Makassar, Selasa (5/8/2025). Menurut Muchlis, Perda yang saat ini berlaku sudah berjalan cukup lama dan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

"Perda ini harus diperbarui agar selaras dengan kondisi saat ini, termasuk perkembangan teknologi dalam pengumpulan zakat. Perwali akan menjadi payung teknis yang memperkuat pelaksanaannya di lapangan," ujar Muchlis.

Ia menjelaskan, potensi zakat di Kota Makassar sangat besar jika dikelola dengan baik dan profesional. Menurutnya, zakat dapat menjadi i

"Makassar punya potensi zakat yang tinggi, terutama dari sektor perdagangan dan jasa. Jika dikelola secara akuntabel, ini bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi umat yang signifikan," tambahnya.

Muchlis juga mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga resmi lainnya yang telah ditunjuk pemerintah. Hal ini dinilai penting agar penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam kesempatan tersebut, Muchlis turut mendengarkan masukan dari peserta sosialisasi yang terdiri dari tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan perwakilan lembaga zakat. Mereka menyambut baik gagasan pembaruan Perda dan penguatan regulasi teknis melalui Perwali.

Instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial serta membantu pengentasan kemiskinan di kota ini.



Andi Tenri Uji Idris Sosialisasikan Perda Perumda Air Minum Kota Makassar



Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, Gelar Sosialisasi Perda Perumda Air Minum Kota Makassar, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar di Hotel Almadera pada Sabtu (9/8/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2019 dan dihadiri peserta dari berbagai lapisan masyarakat yang antusias untuk mengetahui lebih dalam mengenai regulasi dan pengelolaan air minum di Kota Makassar.

Acara ini dipandu oleh moderator Rini Susanti yang mengarahkan jalannya diskusi secara terstruktur. Para narasumber yang hadir memberikan penjelasan mendalam tentang isi Perda serta dampaknya bagi masyarakat maupun Perumda Air Minum sebagai penyedia layanan publik.

Narasumber pertama, Indira Mulyasari, menekankan pentingnya peran masyarakat

dalam menjaga kualitas dan ketersediaan air bersih. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program penyediaan air minum memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk menggunakannya secara bijak.

Nugroho Adi Putra, S.STP, sebagai narasumber kedua, menjabarkan aspek teknis dan operasional yang diatur dalam Perda tersebut. Ia menguraikan tugas Perumda Air Minum dalam memastikan distribusi air yang merata, perbaikan infrastruktur, serta keterbukaan dalam pengelolaan demi peningkatan pelayanan kepada warga.

Narasumber ketiga, Armien Harry, mengulas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Perumda Air Minum di era modern. Menurutnya, penerapan inovasi dan digitalisasi sistem akan menjadi kunci peningkatan efisiensi, mulai dari pencatatan pemakaian air hingga kemudahan metode pembayaran bagi pelanggan.



Ruslan Lallo Ingatkan Pajak Bukan Sekadar Kewajiban

Anggota DPRD Kota Makassar, Ruslan Lallo, menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Angkatan IX Tahun Anggaran 2025, di Hotel Karebosi Premier, Jumat, (16/08/2025).

Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri utama, yakni Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar, Muhammad Afif Azdy, serta narasumber kedua, Agusman Pammu.

Dalam sambutannya, Ruslan Lallo menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai aturan pajak dan retribusi. "Perda ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, retribusi jasa umum, hingga izin tertentu yang menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan kota," ujarnya.

Ruslan menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pungutan daerah. Ia juga berharap warga dapat memanfaatkan forum ini untuk bertanya langsung kepada pihak berwenang jika menemukan kendala di lapangan.

"Kita ingin masyarakat bukan hanya patuh membayar pajak, tapi juga memahami bagaimana dana itu kembali dalam bentuk layanan publik," ucapnya.

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan pajak dan retribusi. "Kalau masyarakat melihat hasilnya, saya yakin kesadaran membayar pajak akan semakin tinggi," kata Ruslan.



Andi Suhada Sappaile Minta Orang Tua Dampingi Anak Bermain Gadget



Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile meminta orang tua untuk lebih bijak dalam memberikan pendampingan selama anak bermain gadget atau smartphone.

Hal itu disampaikannya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Bertempat di Hotel Asyira Jalan Maipa, Minggu (17/8/2025).

Dia menilai, media sosial saat ini mudah mempengaruhi anak. Ada banyak konten berbahaya yang tidak patut ditiru anak sehingga perlu pendampingan oleh orang tua. "Media sosial itu banyak sekali kontennya. Kecenderungan anak itu mudah sekali ikuti apa yang dilihat," ujarnya.

Ketua PDI Perjuangan Makassar itu mengatakan bahwa orang tua harus-

membatasi anak bermain gadget. Namun harus dilakukan dengan bijak tanpa mempengaruhi psikologis anak.

"Anak-anak itu harus di edukasi dengan baik. Kalau orang tuanya cara penyampaianya buruk, keras maka anak juga susah diatur," tambahnya.

Melalui perda ini, Andi Suhada berharap orang tua lebih memberi perhatian khusus kepada anak. "Perda ini mengatur bagaimana anak itu dilindungi agar terhindar dari kekerasan, tapi yang perlu diperhatikan adalah pengawasan orang tua," tutupnya.

Adapun narasumber yang hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Akademisi Prof Nurlina Subair, Sekretaris Dinas Kearsipan Makassar Amalia Malik, dan praktisi Indira Mulyasari Paramastuti.



Odhika Cakra Ajak Warga Kawal Kebijakan Daerah

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, anggota DPRD Kota Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, menggelar sosialisasi di Condotel Karebosi, Makassar, Selasa (19/8/2025).

Kegiatan yang dipandu oleh moderator Muh. Akbar Basri ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yakni Firman Wahab, S.IP, Dedy Kurniawan, S.IP, dan Ridwan Usman.

Dalam sambutannya, A. Odhika Cakra Satriawan menegaskan pentingnya sosialisasi regulasi baru ini agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan dan retribusi yang berlaku.

"Kami ingin memastikan bahwa perda ini tidak-

hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat edukatif bagi warga," ujarnya.

Firman Wahab, S.IP, selaku narasumber pertama, menekankan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional dan kebijakan fiskal daerah.

"Perubahan ini tidak semata-mata soal tarif pajak dan jenis retribusi, tetapi lebih pada penguatan sistem pelayanan dan akuntabilitas," jelas Firman.

Sementara itu, Dedy Kurniawan, S.IP, memaparkan aspek teknis dalam pelaksanaan perda, termasuk digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak. "Digitalisasi ini bertujuan memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Dengan begitu, peluang penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisir," ujarnya.

Meinsani Kecca Dorong Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan

DPRD Kota Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini merupakan bagian dari program tahun anggaran 2025 angkatan IX (sembilan) yang dilaksanakan di Hotel Harper Makassar, Jumat (22/8/2025).

Sosialisasi ini dibuka oleh Anggota DPRD Kota Makassar H. Meinsani Kecca, S.Sos, yang sekaligus memberikan materi pertama. Dalam sambutannya, H. Meinsani Kecca, S.Sos menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Peraturan ini hadir untuk mengatur dan mengawal pengelolaan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan lestari. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, perlu kerja sama semua pihak,” ungkapnya.



Sebagai pemateri kedua, Drs. Suwandi, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, memaparkan secara rinci isi Perda Nomor 9 Tahun 2016. Ia menjelaskan kewajiban masyarakat, pelaku usaha, serta mekanisme pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

“Perda ini merupakan payung hukum untuk menindak setiap pelanggaran yang merugikan lingkungan. Penegakan aturan harus berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat,” kata Suwandi.

Sementara itu, Muh. Taufiq Zainuddin, SE., M.Si, mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009–2014, sebagai pemateri ketiga membahas tantangan dalam implementasi Perda serta pentingnya pengawasan berkelanjutan.

“Peraturan yang baik tidak akan berjalan efektif tanpa pengawasan ketat dan kesadaran masyarakat. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan warga adalah kunci suksesnya implementasi Perda ini,” ujarnya.

Umiyati Tegaskan Penerapan QRIS Disertai Penguatan Infrastruktur

DPRD Kota Makassar menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai sektor layanan publik.

Namun, mereka mengingatkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) tidak hanya fokus pada seremoni peluncuran, tetapi juga memastikan kesiapan teknis di lapangan.

Program digitalisasi layanan ini resmi dimulai dengan peluncuran QRIS di sektor terminal, pasar tradisional, dan PDAM oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di Pasar Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Umiyati, menilai langkah ini sebagai terobosan penting, namun harus dibarengi dengan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.

“Digitalisasi itu penting, tapi jangan hanya tampak canggih di permukaan. Pertanyaannya, apakah semua juru parkir sudah punya perangkat untuk akses QRIS? Apakah di pasar perangkatnya tersedia? Di PDAM, bagaimana sistem integrasinya?” ujar Umiyati, Senin (4/8/2025).

Ia menekankan pentingnya perangkat pendukung, seperti ponsel pintar bagi para juru parkir, serta kelengkapan identitas berupa ID card dengan barcode QRIS yang mencantumkan lokasi tugas.

Menurutnya, ini bukan hanya soal kenyamanan pengguna, tetapi juga soal keamanan dan kepercayaan publik. “Masyarakat harus tahu siapa yang resmi dan mana yang tidak. Ini bagian dari sistem yang sehat,” imbuhnya.





Ray Suryadi Tegaskan Kabel FO Semrawut Ancam Keselamatan dan Estetika

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap pemasangan kabel fiber optik (FO) di Kawasan Bonto Lempangan, Kamis (7/8/2025) lalu.

Menariknya, sidak itu mengungkap temuan mengejutkan: dari ratusan kabel fiber optik (FO) yang terpasang, diduga hanya satu provider yang memiliki izin resmi.

Menganggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengapresiasi langkah wali kota meninjau langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, temuan tersebut membuktikan banyak provider memasang kabel tanpa prosedur yang benar.

“Saya kira selama ini pemasangan kabel FO dan telepon sudah melalui proses perizinan, termasuk persetujuan dari lurah maupun camat. Ternyata, hasil sidak membuktikan mereka memasang semauanya saja tanpa memperhatikan aspek keselamatan,” ujar Ray, Minggu (10/8/2025).

memperhatikan aspek keselamatan,” ujar Ray, Minggu (10/8/2025).

Ray menegaskan, pemasangan kabel sembarangan berpotensi membahayakan masyarakat. Kabel yang berat atau menggantung rendah bisa mengganggu rumah warga, membahayakan pengguna jalan, hingga merusak pemandangan kota.

“Selain soal keamanan, aspek estetika pembangunan di Makassar juga terganggu. Kita ini punya rencana tata ruang yang harus dipatuhi,” tegasnya.

Komisi C berencana memanggil seluruh provider untuk rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan menghadirkan perwakilan 15 kecamatan.

Karena jelas, tidak boleh ada pemasangan tanpa pemberitahuan. Masalah ini ujung-ujungnya soal lemahnya pengawasan dan aturan. Solusinya adalah memperkuat regulasi sekaligus pengawasannya,” ujarnya.

Kasrudi Harap Koperasi Merah Putih Membuka Peluang Usaha Baru



Sebanyak 153 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Kota Makassar resmi diberangkatkan mengikuti kegiatan retreat di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).

Agenda ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pelepasan peserta dilakukan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Makassar, Zainal Ibrahim, di Ruang Sikapatau, Kantor Balai Kota Makassar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menilai pembentukan koperasi ini telah berjalan sesuai harapan. Ia berharap keberadaan Koperasi Merah Putih tidak hanya sebatas wadah, tetapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang usaha baru.

“Harapannya dari Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk itu ada inovasi-inovasi baru, ada usaha-usaha baru yang bisa kita ambil dan kelola. Jangan serta-merta hanya dibuat koperasi tanpa usaha di dalamnya,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Kasrudi menegaskan, koperasi harus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Ia tidak ingin koperasi tersebut hanya menjadi formalitas untuk memenuhi instruksi pemerintah. Namun benar-benar menjadi wadah produktif yang mengangkat potensi lokal.

“Jadi tidak serta-merta saja dibuat koperasi, lalu tidak ada usaha di dalamnya. Karena koperasi ini dibentuk untuk memperdayakan masyarakat-masyarakat yang ada di kelurahan. Kita kan di kelurahan ini, bukan di desa,” ujarnya.

Legislator Gerindra itu juga berharap produk-produk lokal dari Makassar dapat menembus pasar provinsi bahkan nasional melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, dengan dukungan pengelolaan yang baik, koperasi bisa menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pasar yang lebih luas.



Andi Makmur Dukung Usulan Festival Budaya Satu Bulan di Makassar

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berencana menggelar perayaan budaya skala besar dalam rangka menyambut Hari Kebudayaan Nasional. Rencananya, kegiatan ini tidak hanya berlangsung sehari atau dua hari, melainkan selama satu bulan penuh, mulai 17 September hingga 17 Oktober mendatang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sudah lebih dulu menyampaikan gagasan ini saat membuka Festival Bulan Budaya pada 14 Agustus 2025 lalu. Ide tersebut kemudian mendapat sambutan positif dari legislatif.

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai langkah itu dapat membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal dan menikmati kekayaan budaya lokal.

“Karena penting kiranya masyarakat mengetahui budaya lokal kita yang terekspos

secara maksimal. Kalau dilaksanakan hanya sehari atau dua hari, lalu kemudian itu pun hanya ditonton para pejabat, saya pikir itu terkesan hanya acara seremoni,” ucapnya.

Menurut legislator fraksi PKB tersebut, festival dengan durasi sebulan penuh bisa memberi dampak nyata, terutama bagi generasi muda.

“Sehingga dengan adanya itu (rencana festival budaya selama satu bulan penuh) bisa menjadi sebuah harapan baik yang di mana kebudayaan kita sudah bisa disaksikan oleh masyarakat, khususnya anak muda kita di masa yang akan datang. Secara pribadi, saya setuju dengan usulan itu,” ujarnya.

Andi Makmur yang mewakili Dapil V Makassar menekankan pentingnya susunan acara yang matang. Menurutnya, setiap hari harus ada agenda berbeda agar festival benar-benar hidup.



Andi Suharmika Desak Perbaiki Sistem Pengelolaan Sampah

Persoalan pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan tajam di DPRD Kota Makassar. Keterlambatan pengangkutan sampah yang terjadi di banyak kelurahan dinilai berakar dari dua masalah utama: minimnya armada dan lemahnya sistem pemeliharaan mobil sampah milik pemerintah kota.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa Pemkot tidak boleh lagi memandang enteng masalah ini. Dalam forum resmi DPRD, ia menyoroti khususnya soal perawatan mobil sampah yang masih terpusat di satu instansi teknis.

“Setiap tahun kita bahas ini, tapi tidak pernah ada solusi nyata. Kalau memang beban pemeliharaan tidak bisa ditangani dinas, sudah sebaiknya dialihkan ke kecamatan atau dikerjasamakan dengan bengkel resmi. Jangan sampai mobil sampah rusak berbulan-bulan hanya karena antrean panjang di PU,” ujarnya (22/8/2025).

Ia menekankan bahwa keterlambatan-

penanganan mobil rusak bisa langsung berdampak pada akumulasi sampah di permukiman. Optimalisasi pengelolaan sampah, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari kesiapan armada.

“Ini soal pelayanan dasar kota. Kalau sampah terlambat diangkut, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemkot harus segera menjadikan persoalan armada sampah sebagai prioritas,” pungkash Suharmika.

Sorotan serupa datang dari Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Irwan Djafar. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan armada kecil pengangkut sampah atau bokuda di tingkat kelurahan harus mendapat perhatian khusus dalam APBD mendatang.

“Banyak kelurahan terlambat mengangkut sampah warga hanya karena tidak ada bokuda. Ini kendala utama di lapangan. Saya sudah sampaikan di Banggar, pengadaan armada baru harus segera direalisasikan,” ungkap Irwan.



Nasir Rurung: Pembangunan PLTSa di TPA Antang Sudah Sesuai Aturan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyatakan kesepakatan bahwa proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau PSEL sebaiknya dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Tamangapa, Kecamatan Manggala.

Keputusan ini muncul sebagai respons atas penolakan warga Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, serta mempertimbangkan aspek legal dan tata ruang kota.

Anggota DPRD Kota Makassar, Nasir Rurung, menegaskan bahwa secara aturan, pembangunan PLTSa memang telah dirancang untuk dilakukan di wilayah TPA Antang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur proyek tersebut.

“Kita harus taat pada aturan yang ada. Segala bentuk peraturan yang sudah dibuat pemerintah kota itu yang harus diikuti, bukan keinginan investor yang masuk

Jangan sekali-kali mau diatur,” tegas Nasir.

Nasir juga mengungkapkan penolakan warga didasari oleh kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial di masa depan, seperti pencemaran udara dan air, serta kemacetan akibat peningkatan lalu lintas kendaraan pengangkut sampah.

“Warga merasa terancam akan kegiatan itu, baik bagi anak-anaknya maupun cucunya nanti. Udara dan air bisa tercemar, dan jalur transportasi juga bisa terganggu. Penolakan mereka sangat rasional,” tambahnya.

Menurut Nasir, lokasi yang sebelumnya direncanakan untuk proyek PLTSa berada di kawasan permukiman dan industri, sehingga tidak sesuai dengan tata ruang yang ideal untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam perencanaan pembangunan kota.

Munafri Maknai Hari Kemerdekaan Jika Masyarakat Bebas dari Masalah Sosial

D Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin memaknai Upacara peringatan HUT ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Karebosi sebagai momentum refleksi, Minggu (17/08/2025),

Ia menekankan bahwa kemerdekaan bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi harus dimaknai sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Munafri, makna kemerdekaan adalah bagaimana bangsa ini terbebas dari berbagai persoalan sosial, sekaligus memastikan pemerintah hadir memberikan pelayanan yang lebih baik.

Kesannya, alhamdulillah sangat nikmat punya pengalaman baru dan yang paling penting adalah kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sehat dan walafiat.

Ia menilai kemerdekaan baru memiliki arti ketika-

“mampu membawa perubahan nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Makna kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka dari permasalahan permasalahan sosial yang ada. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pemerintah jadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” jelas Munafri saat ditemui usai pelaksanaan Upacara.

Bagi Munafri, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati, melainkan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang menghadirkan pembangunan berkelanjutan.

“Kita mengharapkan kado itu bagaimana kolaborasi bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat kota makassar ini semakin bagus,” ujarnya.





Kado HUT RI ke-80, Pemkot Makassar Pastikan PBB 2025 Tidak Naik

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memberi kado istimewa bagi masyarakat di momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, Pemkot berhasil mengumpulkan Rp258 miliar. Sementara target PBB di tahun 2025 dipatok Rp275 miliar dalam anggaran perubahan.

Tahun ini, Pemkot dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wawali Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah) memastikan tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

"Alhamdulillah, walaupun tidak signifikan, pendapatan kita perlahan meningkat, apalagi mendekati jatuh tempo 30 September nanti. Satu hal yang perlu dipahami, PBB ini sifatnya hanya dibayar sekali dalam setahun," ujarnya.

Kepala UPT PBB Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Indirwan Dermayasair, menegaskan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pemerintah untuk tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Indirwan menegaskan, pemerintah menyadari adanya dua sisi dari kebijakan PBB. Jika dinaikkan, potensi fiskal kota memang meningkat, tetapi masyarakat akan terbebani.

"Memang tahun ini tidak ada kenaikan NJOP tanah maupun tarif PBB. Jadi cara kami meningkatkan pendapatan dilakukan dengan memaksimalkan potensi melalui pemuktahiran data. Contohnya, lahan yang awalnya belum ada bangunan, sekarang sudah ada, itu yang kita masukkan," jelas Indirwan.

Sebaliknya, ketika tidak dinaikkan, penerimaan tidak melonjak signifikan, namun kebijakan ini dinilai lebih pro-rakyat. "Kami tetap konsisten pada pilihan pro masyarakat. Pendapatan tetap bisa kita optimalkan lewat basis data yang lebih akurat," pungkasnya.

Meski tanpa kenaikan tarif, Indirwan menyebutkan realisasi penerimaan PBB tetap

la juga meluruskan informasi yang beredar terkait wajib pajak yang diminta datang ke kantor Bapenda. Menurutnya, kehadiran wajib pajak lebih kepada pengecekan peta blok, bukan soal pembayaran.



Prabowo Perdana Pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-80 RI



Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Momentum bersejarah ini sekaligus menjadi peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia yang tahun ini mengusung tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury, kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Tak lama berselang, dentuman meriam dan bunyi sirene panjang, menggema menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi.

Momen khidmat terjadi ketika Presiden Prabowo membacakan langsung naskah proklamasi yang 80 tahun silam dikumandangkan oleh proklamator, Soekarno. Usai pembacaan, Kepala Negara memimpin segenap peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan.

Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar memandu pembacaan doa, menghadirkan

Bianca Alessia Christabella Lantang, perwakilan Sulawesi Utara, dipercaya membawa bendera Merah Putih. Ia didampingi El Rayyi Mujahid Faqih dari Kalimantan Timur sebagai pembentang, Farrel Argantha Irawan dari DKI Jakarta sebagai pengerek, dan Arka Bintang Is'adkauthar dari Jawa Timur sebagai Komandan Kelompok 8.

Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih pun perlahan naik dan berkibar dengan gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut penuh rasa bangga oleh seluruh hadirin. Selepas pengibaran, laporan terakhir komandan upacara kepada inspektur upacara menandai berakhirnya prosesi sakral Detik-Detik Proklamasi.

Upacara bersejarah ini tidak hanya menjadi momentum mengenang proklamasi kemerdekaan, tetapi juga meneguhkan semangat persatuan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

suasana syahdu di halaman Istana Merdeka. Prosesi berlanjut dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim “Indonesia Berdaulat.”



Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Hadirkan Harapan untuk Anak Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat menjadi awal dari lahirnya harapan baru bagi anak-anak bangsa. Dalam arahnya kepada para guru dan kepala sekolah pada Jumat, (22/8/2025), Kepala Negara menyampaikan bahwa dalam waktu singkat lebih dari seratus Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi.

“Tapi kita buktikan, yang tidak pernah diduga hari ini 100 sekolah sudah berdiri, sudah beroperasi, sudah kelihatan gagah-gagah semua ini. Banyak senyumnya, saya lihat mata mereka penuh dengan percaya diri. Saya terima kasih, dan tadi saya besar hati testimoni dari beberapa siswa yang masuk program ini,” ujar Presiden di Jakarta International Expo (JIE expo), Jakarta.

Menurut Presiden, program ini lahir dari keprihatinan terhadap kondisi sebagian rakyat yang masih berjuang merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. “Yang jelas kita sudah mulai melihat titik-titik harapan. Kita

sudah melihat cerahnya anak-anak yang mungkin tadinya risau apa yang akan terjadi,” ucapnya.

Kepada para guru dan kepala sekolah, Presiden menitipkan pesan khusus agar tetap setia menjalankan tugas mulia mencerdaskan generasi penerus. “Bina anak didikmu, didik mereka dengan baik. Beri harapan kepada mereka, bantu mereka, buat mereka gembira. Jangan buat mereka pesimis,” pesannya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri atas dukungan penuh mereka terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Kita akan mencapai cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia. Jangan pernah ragu, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecil hati, jangan pernah melecehkan pemimpin-pemimpin kita sendiri. Jangan pernah menghina orang tua kita sendiri,” tegas Presiden.



Jejak Kucing di Dunia Sains: Hewan Lucu yang Berjasa bagi Ilmu Pengetahuan

PBagi banyak orang, kucing adalah hewan yang lucu dan manja. Tak heran jika ia dipelihara dan Bagi banyak orang, kucing adalah hewan yang lucu dan manja. Tak heran jika ia dipelihara dan memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia. Namun, di balik tatapan tajam dan dengkurannya, hewan ini menyimpan sejarah panjang sebagai “asisten” para ilmuwan.

Selama berabad-abad, kucing tidak hanya menjadi sahabat manusia, tetapi juga mitra dalam dunia ilmu pengetahuan. Dikutip dari animalresearch.info, sejak 1898, hewan ini telah berperan dalam berbagai penelitian medis.

Mulai dari studi tentang emosi, penyakit jantung, cedera tulang belakang, hingga operasi katarak, glaukoma, lupus, diabetes, spina bifida, dan banyak penyakit lain yang juga umum terjadi pada manusia.

Hasil dari penelitian ini kemudian memperdalam pemahaman kita mengenai penyakit manusia dan mendorong kemajuan ilmu kedokteran hewan. Dalam bidang sensorik dan ilmu saraf, kucing menjadi salah satu model penelitian yang paling bernilai.

Kemampuan mendengar yang luar biasa, penglihatan tajam, keseimbangan stabil, serta kesadaran spasial yang tinggi menjadikan anatomi sistem sensorik mereka lebih dipahami dibandingkan hewan lain.

Kucing juga memiliki kecerdasan dan daya ingat yang mengesankan. Sehingga hewan imut ini kerap digunakan dalam uji pembelajaran di laboratorium, dengan temuan yang bahkan diterapkan dalam dunia pendidikan manusia.

Jadi, lain kali saat kucing Anda tidur malas di sofa atau menatap kosong ke luar jendela, ingatlah bahwa ia berasal dari garis keturunan “ilmuwan” berbulu yang pernah membantu manusia memahami rahasia tubuh dan otak.

5 Film India Ini Bikin Kamu Mikir Keras, Ending-nya Bikin Shock!



Film India tak hanya terkenal lewat sinema musikal dengan bumbu drama emosional, tapi juga lewat cerita-cerita thriller dengan alur mengejutkan. Jika Anda menyukai film dengan akhir yang tak bisa ditebak, berikut lima rekomendasi film India yang penuh misteri dan plot twist yang akan membekas di benak Anda.



Kahaani (2012)

Disutradarai oleh Sujoy Ghosh, Kahaani adalah kisah seorang wanita hamil bernama Vidya Bagchi (Vidya Balan) yang datang ke Kolkata saat festival Durga Puja untuk mencari suaminya yang hilang. Dibantu oleh seorang polisi muda dan agen intelijen, pencarian ini berubah menjadi misteri yang dalam, hingga terungkap fakta mengejutkan di akhir film.

Drishyam (2015 & 2022)

Drishyam adalah film yang mengisahkan seorang pria sederhana bernama Vijay Salgaonkar (Ajay Devgn). Ia rela melakukan segalanya setelah putrinya terlibat dalam insiden tragis. Saat polisi mencurigai mereka, Vijay membangun alibi rumit untuk menghindari jeratan hukum. Namun, adegan penutup film ini akan mengubah cara Anda melihat keseluruhan cerita.

Badla (2019)

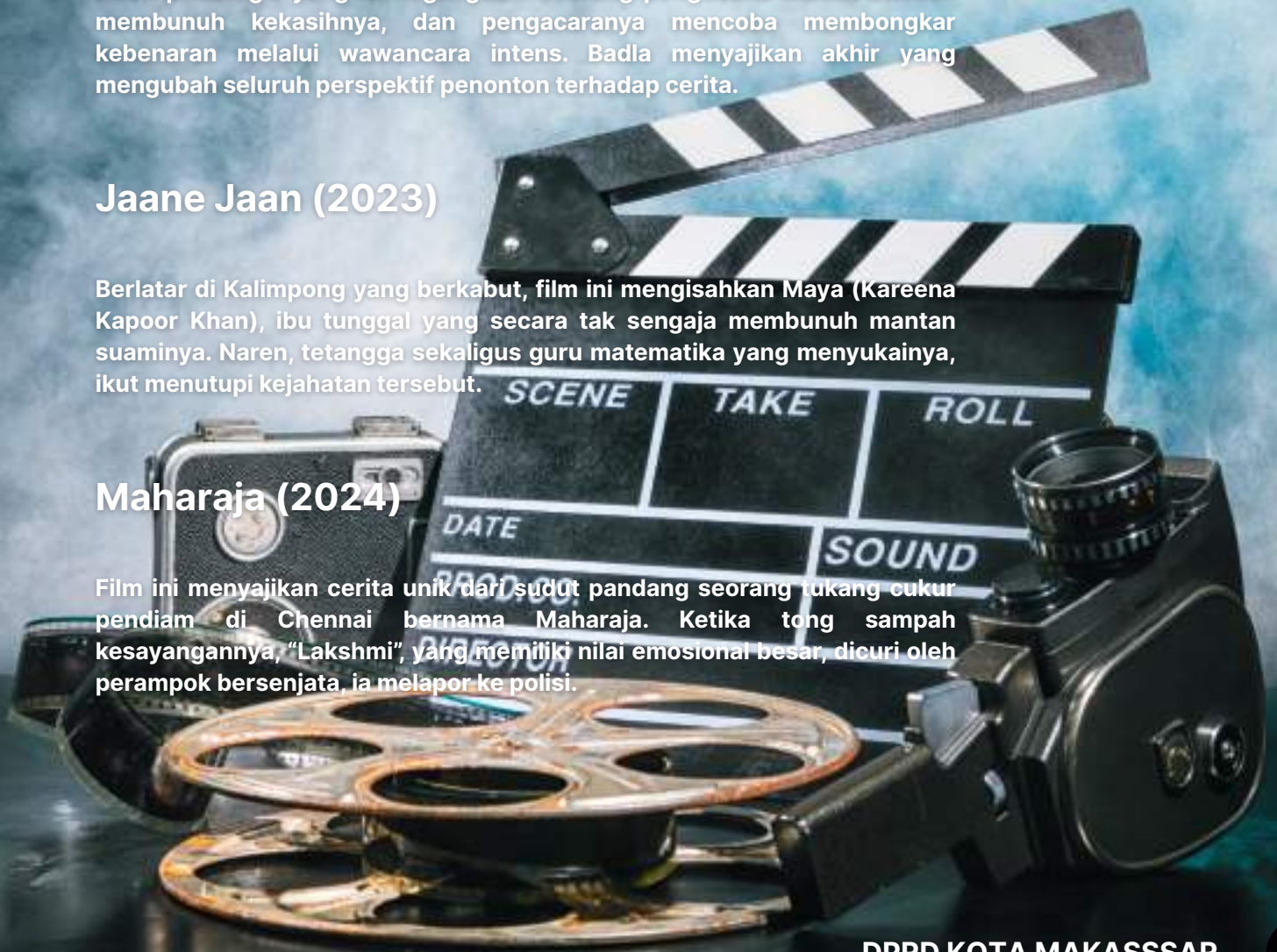
Film ini mempertemukan Taapsee Pannu dan Amitabh Bachchan dalam kisah psikologis yang menegangkan. Seorang pengusaha wanita dituduh membunuh kekasihnya, dan pengacaranya mencoba membongkar kebenaran melalui wawancara intens. Badla menyajikan akhir yang mengubah seluruh perspektif penonton terhadap cerita.

Jaane Jaan (2023)

Berlatar di Kalimpong yang berkabut, film ini mengisahkan Maya (Kareena Kapoor Khan), ibu tunggal yang secara tak sengaja membunuh mantan suaminya. Naren, tetangga sekaligus guru matematika yang menyukainya, ikut menutupi kejahatan tersebut.

Maharaja (2024)

Film ini menyajikan cerita unik dari sudut pandang seorang tukang cukur pendiam di Chennai bernama Maharaja. Ketika tong sampah kesayangannya, "Lakshmi", yang memiliki nilai emosional besar, dicuri oleh perampok bersenjata, ia melapor ke polisi.



Profil Hartono, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar



*Akademisi yang Menyulam
Dakwah di Pentas Politik*

Hartono, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), adalah pribadi yang memancarkan kesederhanaan dalam sikap namun menyimpan dedikasi mendalam terhadap masyarakat.

Langkahnya menuju dunia politik bukanlah awal dari kisah hidupnya. Melainkan babak yang dilandasi perjalanan panjang sebagai akademisi, pengusaha yang visioner, dan tokoh masyarakat yang dicintai.

Awal Karier: Dari Akademisi ke Pengusaha

Sebelum terjun ke dunia politik, Hartono menghabiskan lebih dari 10 tahun sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi terkemuka. Ia pernah mengajar di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), STIE Makassar Maju, dan Politeknik Informatika Nasional (Polinas).

Pada tahun 2017, Hartono memulai babak baru dalam hidupnya dengan membangun usaha keluarga di bidang distribusi bahan digital printing dan pengelolaan rumah kos. "Konsentrasi akhirnya di dunia usaha apalagi pas masuk pandemi saya fokus di usaha. Itulah yang jadi kesibukan saya," ujarnya.

Awal Mula Terjun ke Dunia Politik

Awal tahun 2023 menjadi titik balik dalam hidup Hartono ketika teman-temannya mengajak dia untuk bergabung ke dalam dunia politik. Setelah melalui konsultasi dan diskusi mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hartono mengungkapkan, proses pemilihannya untuk bergabung dengan PKS didasarkan pada keyakinan bahwa partai ini dapat menjadi rumah yang nyaman untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Ia juga melihat PKS sebagai wadah yang selaras dengan prinsip hidupnya untuk berdakwah melalui jalur politik.

Awal tahun 2023 menjadi titik balik dalam hidup Hartono ketika teman-temannya mengajak dia untuk bergabung ke dalam dunia politik. Setelah melalui konsultasi dan diskusi mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hartono mengungkapkan, proses pemilihannya untuk bergabung dengan PKS didasarkan pada keyakinan bahwa partai ini dapat menjadi rumah yang nyaman untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Ia juga melihat PKS sebagai wadah yang selaras dengan prinsip hidupnya untuk berdakwah melalui jalur politik.

Awal Mula Terjun ke Dunia Politik

Maju di Pileg 2024 adalah pengalaman pertama Hartono berkontestasi di dunia politik. Meskipun begitu, sebagai sosok yang memiliki aktivitas sosial yang tinggi, dia telah memupuk modal sosial sejak lama. Modal sosial itu pun kemudian hari banyak menyumbang untuk keterpilihannya di DPRD Makassar.

Hartono aktif di Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma), sebuah paguyuban masyarakat Enrekang, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Dalam perannya, Hartono berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setiap tahun, ia selalu menghitung kewajiban zakatnya dan menyalurkannya langsung kepada masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di Kampung Nipa-Nipa. Lebih dari 300 rumah tangga mendapatkan manfaat dari zakat yang ia bagikan baik di sekitar rumahnya sendiri maupun di sekitar usaha kos yang dia bangun.

“Saya termasuk orang yang mudah karena saya tidak pernah memilah-milah kepada siapa saya harus membantu. Pokoknya kalau ada yang bisa saya bagi, pasti saya bagi. Karena saya berkeyakinan kebahagiaan ada ketika banyak orang yang tersenyum dan bahagia bersama kita,” tambah hartono.

Perjalanan Politik yang Mengalir

Meski awalnya tidak memiliki ambisi politik, Hartono mengaku menikmati setiap proses yang dijalankannya. Ia merasa perjalanan politiknya begitu mengalir dan tanpa beban karena niat utamanya adalah untuk melayani masyarakat.

Dengan mengedepankan gagasan dan visi, Hartono berhasil menarik simpati masyarakat, terutama warga Massenrempulu, yang telah mengenalnya melalui berbagai kegiatan sosial. Karena sejak awal dengan penuh keyakinan Hartono sudah punya kepercayaan diri bahwa dirinya akan terpilih menjadi DPRD Makassar, meskipun harus berhadapan dengan incumbent.

Data diri

Nama: Hartono

Tempat tanggal lahir: Enrekang, 18 Agustus 1979

Jabatan di legislatif: Anggota Komisi B DPRD Makassar

Partai: PKS

Jabatan di partai: Sekretaris Fraksi PKS DPRD Makassar

Status: Menikah

Pendidikan: S2



TABLOID **UMAH RAKYAT**

• DPRD KOTA MAKASSAR



@dprd.makassar



@humasdprdmakassar



setwan_dprd.mks



Humas DPRD Makassar

<https://dprd.makassar.go.id>